

1950
1951
1952

1953
1954
1955

1956
1957
1958

1959
1960
1961

09

26/09
/6

PERPUSTAKAAN IKK
FEMA - IPB

Makalah Seminar

**PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
BIDANG PENDIDIKAN DALAM MENYONGSONG
ERA GLOBALISASI**

Oleh:

Dr. Ir. Herien Puspitawati, M.Sc., M.Sc.
Staf Pengajar Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen
Fakultas Ekologi Manusia-Institut Pertanian Bogor

Disampaikan Pada Lokakarya
Pengarusutamaan Gender dalam Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan
Menuju Kualitas Kehidupan Berkelanjutan
Kampus IPB Darmaga- 10 September 2007



**DEPARTEMEN ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN
FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

BOGOR
2009

PERPUSTAKAAN - IKK	
Terima Dari	
REG : 2009010 0247	Sumbangan Pemberian Pertukaran
TGL : 1/10	
No. KLAS.	

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan bukti dikeluarkannya INPRES No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional yang menginstruksikan kepada seluruh pejabat negara, termasuk Gubernur dan Bupati/Walikota untuk melaksanakan PUG di seluruh wilayah Indonesia. PUG yang dimaksudkan adalah melakukan seluruh proses pembangunan mulai dari penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi yang berperspektif gender dengan melibatkan peranserta warga negara baik laki-laki maupun perempuan.

Peran Departemen Pendidikan Nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Republik Indonesia Tahun 2004-2009. Desain Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia tercermin dari Visi dan Misinya. VISI Pembangunan Nasional Tahun 2004-2009 diarahkan untuk mencapai: (1) Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai; (2) Terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia; dan (3) Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya berdasarkan VISI Pembangunan Nasional tersebut ditetapkan 3 (tiga) MISI Pembangunan Nasional Tahun 2004-2009 yang meliputi: (1) Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai; (2) Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis; dan (3) Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera.^{1) 2)}

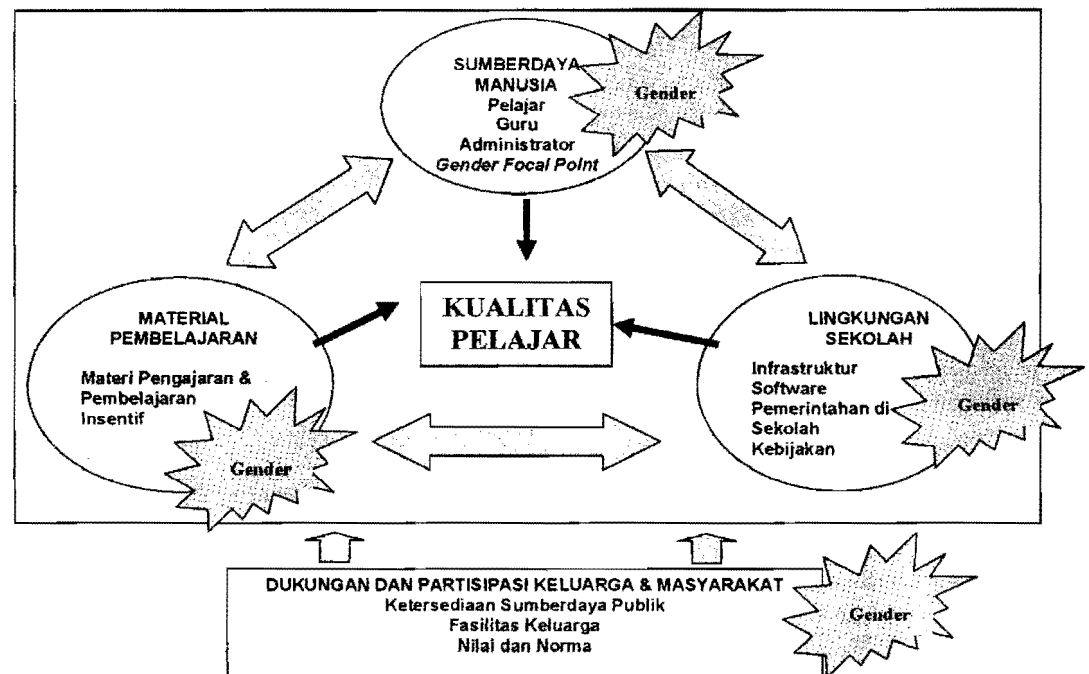
Departemen Pendidikan Nasional mengemban tugas yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang tertera pada Pasal 27, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa; Pasal 28C (1) bahwa setiap orang berhak untuk mengembangkan dirinya melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasarnya, berhak atas pendidikan dan untuk memetik manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, untuk meningkatkan mutu kehidupannya dan untuk kebaikan seluruh umat manusia; Pasal 31 (1) bahwa setiap warga negara berhak menerima pendidikan; dan Pasal 31 (2) bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib mendanai ini.

Pengarusutamaan Gender di Bidang Pendidikan mengacu pada arah dan strategi Pembangunan Pendidikan seperti tercantum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) dengan tujuan pembangunan pendidikan yang diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai cultural, dan kemajemukan bangsa (Gambar 1).

Landasan kebijakan yang disusun oleh Departemen Pendidikan Nasional juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Seiring dengan era globalisasi total, maka isu kesetaraan gender menjadi isu global yang sangat relevan menyangkut keterpaduan antara kerjasama laki-laki dan perempuan di segala bidang. Sebagai komitmen global dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender

dalam bidang pendidikan, Indonesia juga merujuk pada 8 (delapan) tujuan utama *Millenium Development Goals (MDGs)* sampai dengan tahun 2015, yaitu: (1) Tujuan Ke-2: yaitu mencapai pendidikan dasar bagi semua dengan tujuan bahwa pada tahun 2015 semua anak baik laki-laki maupun perempuan dapat mengenyam pendidikan dasar, dan (2) Tujuan Ke-3: yaitu mempromosikan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan dengan tujuan untuk menghapuskan segala bentuk disparitas gender dalam pendidikan dasar dan menengah paling lambat pada tahun 2015.



Gambar 1. KUALITAS SISTEM PENDIDIKAN YANG RESPONSIF GENDER

(Disarikan dari UNESCO, 2005 dan UU No 20 Tahun 2003)

Sebagai salah satu negara anggota UNESCO, Indonesia telah menandatangani Kesepakatan Dakar mengenai Kebijakan Pendidikan Untuk Semua atau PUS (*Education for All*), yang di dalamnya mencanangkan beberapa hal penting berkenaan dengan target pencapaian kesetaraan gender dalam bidang pendidikan. Target kebijakan tersebut adalah : (1) Menjamin bahwa menjelang tahun 2015 semua anak, khususnya anak perempuan, anak-anak dalam keadaan yang sulit dan mereka yang termasuk etnik minoritas, mempunyai akses pada dan menyelesaikan pendidikan dasar yang bebas dan wajib dengan kualitas yang baik, (2) Mencapai perbaikan 50% pada tingkat keniraksaraan orang dewasa menjelang tahun 2015, terutama bagi kaum perempuan, dan akses yang adil pada pendidikan dasar dan pendidikan berkelanjutan bagi semua orang dewasa, dan (3) Penghapusan *kesenjangan gender* pada Pendidikan Dasar dan Menengah pada tahun 2005 dan mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan pada tahun 2015 dengan fokus pada kepastian sepenuhnya bagi anak perempuan terhadap akses dalam memperoleh Pendidikan Dasar yang bermutu.

Makalah ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai pentingnya pengarusutamaan gender (PUG) di bidang pendidikan dengan terlebih dahulu disajikan secara garis besar data dan informasi mengenai kesenjangan gender bidang pendidikan. Kemudian dijelaskan pula mengenai mekanisme PUG yang sudah dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional berikut masukan-masukan mengenai *checklist* bidang pendidikan (baik *checklist* kesetaraan gender bidang pendidikan di tingkat keluarga dan masyarakat, *checklist* kebijakan kesetaraan gender di bidang pendidikan, dan peran perguruan tinggi dalam meningkatkan prestasi perempuan di bidang pendidikan).

KESENJANGAN GENDER BIDANG PENDIDIKAN DI INDONESIA

Kondisi Kesenjangan Gender Bidang Pendidikan

Meskipun Strategi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional sudah dilakukan sejak tahun 2000 dan Pengarusutamaan Gender bidang pendidikan telah dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan Nasional sejak tahun 2002, namun berdasarkan data statistik tentang pembangunan manusia dan kesetaraan gender masih menunjukkan adanya kesenjangan gender di bidang pendidikan, baik dilihat dari aspek akses dan pemerataan pendidikan, mutu dan relevansi, serta manajemen pendidikan, yaitu:

1. Angka *Gender-Related Development Index (GDI)* Indonesia pada tahun 1999 adalah 0,691, menempati peringkat 87 dari 140 negara di dunia. Sepanjang tahun 1999-2004 angka GDI Indonesia mengalami peningkatan dari 0,670 (1999) menjadi 0,685 (2001) dan 0,690 (2003) dan akhirnya mencapai 0,704 (2004). Namun demikian peringkat GDI Indonesia (81) masih lebih rendah dari Vietnam (80), Filipina (66), Cina (64), Thailand (58) dan Malaysia (51) (*UNDP - Human Development Report 1995 – 2004*).
2. Pada aspek akses dan pemerataan pendidikan masih terjadi kesenjangan gender pada Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Melek Huruf meskipun tingkat kesenjangan bervariasi, yaitu:
 - a. Angka buta aksara perempuan pada tahun 2006 lebih tinggi dibandingkan angka buta aksara laki-laki (Perempuan: 10,73%, laki-laki: 5,40%) (Depdiknas, 2007).
 - b. Persentase angka melek huruf penduduk perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki (perempuan: 85,7%, laki-laki: 93,5% pada tahun 2002) (BPS-Bappenas-UNDP, 2004).
 - c. Rata-rata lama sekolah penduduk perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki (perempuan: 6,5 tahun, laki-laki: 7,6 tahun pada tahun 2002) (BPS-Bappenas-UNDP, 2004).
 - d. Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan pada tahun 2006 sedikit lebih rendah dibandingkan laki-laki untuk jenjang SD (Perempuan: 109,56%, laki-laki: 110,32%), namun sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki untuk jenjang SMP dan SMA (Perempuan: 82,53% dan laki-laki 81,25%; perempuan 57,42% dan 56,00%) (Rosalin, 2007).
 - e. Angka Partisipasi Sekolah (APS) perempuan pada tahun 2006 hampir sama dibandingkan laki-laki untuk jenjang SD (Perempuan: 97,72%, laki-laki: 97,08%), kemudian sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki untuk jenjang SMP (Perempuan: 84,44%, laki-laki: 83,75%), dan sedikit lebih rendah dibandingkan laki-laki untuk jenjang SMA (Perempuan: 53,73 %, laki-laki: 54,09%) (Rosalin, 2007).
 - f. Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan pada tahun 2006 hampir sama dibandingkan laki-laki untuk semua jenjang SD, SMP, dan SMA (Perempuan:

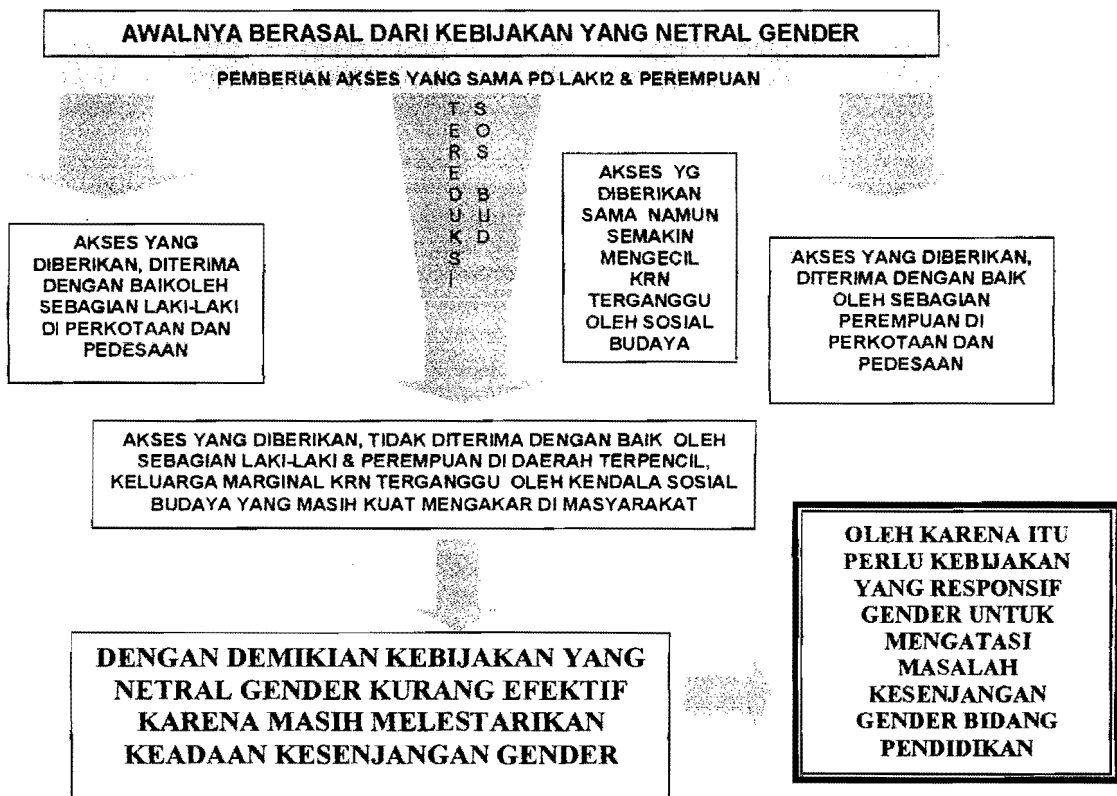
93,26% dan laki-laki 93,80%; perempuan 66,51% dan laki-laki 66,53%; perempuan 43,78% dan laki-laki: 43,77%) (Rosalin, 2007).

3. Pada aspek mutu dan relevansi terjadi bias gender dalam materi bahan ajar dan proses pembelajaran yang bersifat sub-ordinatif yang memperkuat stereotipe/pelabelan yang keliru terkait dengan peran dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang, terutama pada bahan ajar IPS, PPKn dan Bahasa Indonesia.
4. Pada aspek manajemen sekolah masih terjadi kesenjangan gender yaitu representasi perempuan dalam posisi sebagai pengambil kebijakan pendidikan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki sehingga peran perempuan dalam pengambilan keputusan masih terbatas.
 - a. Jumlah tenaga dosen laki-laki lebih besar daripada dosen perempuan dengan proporsi Tingkat/ Golongan IV yang lebih banyak pula pada dosen laki-laki dibandingkan dengan dosen perempuan. Begitu pula dengan proporsi karyawan/ tenaga administrasi yang lebih banyak pada laki-laki daripada perempuan (Data Kopertis Wilayah IV, Juni 2004) (Depdiknas, 2006).
 - b. Proporsi kepala sekolah (Headmasters/ Principals) untuk Jenjang sekolah SMP (*junior*) dan SM (*senior*) masih menunjukkan kesenjangan gender dengan kondisi proporsi kepala sekolah laki-laki jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan (SMP: L= 87%, P= 13%; SM: L=90%, P=10%) (Depdiknas, 2006).
5. Masih adanya pemisahan pemilihan jurusan/ program studi yang bersifat stereotipe (*voluntarily segregation preference*) dimana *hard science* (Ilmu Eksakta) lebih didominasi laki-laki dan *soft science* (Ilmu Sosial) lebih didominasi oleh perempuan.
6. Masih adanya kesenjangan gender pada tenaga pendidik, dimana tenaga pendidik PAUD, TK dan SD pada umumnya lebih didominasi perempuan, sedangkan pada jenjang SMP ke atas lebih didominasi laki-laki.
7. Berdasarkan hasil penelitian Mugniesyah, dkk (2003) di 9(sembilan) Perguruan Tinggi di Jawa Barat, maka diketahui bahwa secara umum domain laki-laki adalah pada kelompok fakultas eksakta, sedangkan perempuan pada kelompok fakultas non-eksakta. Disamping itu laki-laki secara umum lebih mendominasi pendidikan pasca sarjana dibandingkan dengan perempuan. Data mahasiswa (S-0, S-1, S-2, dan S-3) dari 9 Perguruan Tinggi menunjukkan bahwa 54,8% adalah laki-laki dan 48,2% adalah perempuan, dengan komposisi proporsi perempuan lebih banyak dari laki-laki pada jenjang S-0; tetapi proporsi laki-laki lebih banyak dari perempuan pada jenjang S-1, dan selanjutnya semakin meningkat kesenjangan laki-laki dibandingkan perempuan pada S-2 dan S-3. Kesenjangan gender tertinggi terdapat pada Institut Teknologi Bandung (L>P), sedangkan di UPI proporsi perempuan (56,9%) lebih tinggi dari laki-laki (43,1%). Mahasiswa Program S-3 dari 26 Program Studi dari 4 Perguruan Tinggi di Jawa Barat didapatkan bahwa baik program studi yang bersifat eksakta maupun non-eksakta didominasi oleh laki-laki (69,6% dan 65,6%), dan sebagian kecil oleh perempuan (30,4% dan 34,4%).
8. Data Olimpiade Keilmuan baik di Tingkat Nasional maupun Internasional didominasi oleh siswa laki-laki. Prestasi Siswa perempuan masih dalam kuantitas yang minimal.
9. Jumlah lulusan Perguruan Tinggi (Negeri maupun Swasta) di 30 Propinsi di Indonesia pada tahun 2003/2004 menunjukkan proporsi yang seimbang antara laki-laki (50,41%) dan perempuan (49,59%) (Depdiknas, 2004).

Dapat dikatakan bahwa secara umum kesetaraan dan keadilan gender bidang pendidikan di Indonesia masih belum merata berdasarkan jenjang, jalur dan jenis pendidikan. Apabila dianalisis lebih mendalam, maka bentuk kesenjangan gender tersebut bervariasi antar wilayah di Indonesia, baik antar desa-kota maupun antar status sosial masyarakat. Selama ini, kebijakan-kebijakan di bidang pendidikan pada umumnya masih netral gender yang secara tidak langsung

berkontribusi terhadap kesenjangan gender sebagaimana tersebut di atas. Berdasarkan latar belakang inilah, maka perlu ada usaha strategis, terencana dan berkelanjutan untuk memperkecil kesenjangan gender di bidang pendidikan sehingga perempuan dan laki-laki mempunyai kesamaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang setara di bidang pendidikan (Gambar 2).

Dengan demikian, jelaslah sudah betapa pentingnya strategi pengarusutamaan gender (PUG) bidang pendidikan yang diarahkan untuk menurunkan tingkat kesenjangan di bidang pendidikan dalam rangka meningkatkan daya saing baik laki-laki maupun perempuan di era globalisasi. Tuntutan kepada setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan Indonesia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi suatu keharusan, sebagaimana semakin tingginya tuntutan kualitas SDM di Era Globalisasi.



Gambar 2. Proses Pemikiran Pentingnya Kebijakan Departemen Pendidikan Nasional-RI yang Responsive Gender untuk Mengatasi Kesenjangan Gender Bidang Pendidikan.

Ilustrasi oleh: Herien Puspitawati

Pengertian Gender dan Pendidikan 5, 6, 8, 12, 20, 24, 25)

1. Pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan pendidikan adalah suatu strategi pembangunan pendidikan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiatan di bidang pendidikan yang responsif gender.
2. Kesetaraan dan keadilan gender (KKG) adalah suatu kondisi yang setara dan seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/ kesempatan, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan pendidikan untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya melalui proses budaya dan kebijakan yang menghilangkan hambatan-hambatan berperan baik bagi perempuan maupun laki-laki.
3. Kerangka analisis kebijakan gender di bidang pendidikan diarahkan pada analisis terhadap akses, partisipasi, manfaat, dan penguasaan dengan pengertian sebagai berikut:
 - a. Akses (*access*) pada pendidikan mengacu pada pertanyaan apakah semua anak laki-laki dan perempuan memperoleh akses/ peluang yang sama dalam pendidikan.
 - b. Partisipasi (*participation*) dalam pembangunan pendidikan mengacu pada pertanyaan apakah laki-laki dan perempuan dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan pendidikan.
 - c. Penguasaan (*control*) terhadap pembangunan pendidikan mengacu pada pertanyaan apakah laki-laki dan perempuan mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan bagi dirinya terkait bidang pendidikan.
 - d. Manfaat (*benefit*) pembangunan pendidikan mengacu pada pertanyaan apakah laki-laki dan perempuan telah memperoleh manfaat dari pembangunan pendidikan.
4. *Gender Analysis Pathway* (GAP) adalah salah satu alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana pendidikan dalam menyusun kebijakan/ program/ kegiatan pendidikan responsif gender melalui analisis data dan informasi secara sistematis tentang laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi.
5. Perencanaan pendidikan responsif gender adalah perencanaan yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam bidang pendidikan.
6. Pendidikan yang responsif gender adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang memperhatikan perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, permasalahan dan kepentingan antara laki-laki dan perempuan, agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensinya dirinya secara optimal, untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
8. *Focal Point* Pengarusutamaan gender bidang pendidikan adalah individu-individu atau perorangan yang telah memiliki pemahaman dan komitmen tentang gender dan pengarusutamaan gender yang berasal dari dinas pendidikan yang ditunjuk disetiap unit organisasi untuk melaksanakan PUG pendidikan.
9. Kelompok kerja pengarusutamaan gender bidang pendidikan adalah wadah konsultasi bagi para perencana dan pelaksana PUG pendidikan dari berbagai instansi/ lembaga pelaksana PUG di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/ kota.
10. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

11. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lainnya yang sesuai dengan kehususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
12. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
13. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
14. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan yang mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.
15. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
16. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
17. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
18. Data terpilih adalah nilai dari variabel-variabel yang sudah terpilih antara laki-laki dan perempuan berdasarkan topik bahasan/hal-hal yang menjadi perhatian.
19. Data kuantitatif adalah nilai variabel yang terukur.
20. Data kualitatif adalah nilai variabel yang tidak terukur dan sering disebut atribut.
21. Akses adalah peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu.
22. Peran adalah keikutsertaan atau partisipasi seseorang/kelompok dalam suatu kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan.
23. Kontrol adalah penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan.
24. Manfaat adalah kegunaan sumberdaya yang dapat dinikmati secara optimal.
25. Indikator adalah alat ukur berupa statistik yang dapat menunjukkan perbandingan, kecenderungan atau perkembangan.
26. Proses marginalisasi atau pemiskinan merupakan proses, sikap, perilaku masyarakat maupun kebijakan negara yang berakibat pada penyisihan/pemiskinan bagi perempuan atau laki-laki.
27. Proses sub-ordinasi adalah suatu keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibandingkan jenis kelamin lainnya, sehingga ada jenis kelamin yang merasa dinomorduakan atau kurang didengarkan suaranya, bahkan cenderung dieksploitasi tenaganya.
28. *Strereotype* adalah suatu pelabelan atau penandaan yang sering kali bersifat negatif secara umum terhadap salah satu jenis kelamin tertentu.

MENDIDIK PEREMPUAN SAMA DENGAN MENDIDIK BANGSA

Dalam mengerti pemikiran rasional (*rational thought*) bahwa mendidik perempuan sama maknanya dengan mendidik suatu bangsa, maka berikut ini dipaparkan alur pemikiran sebagai berikut. Merujuk pada kualitas SDM atau mutu manusia, maka ada dua segi pandangan, yaitu dari segi pendidikan adalah afeksi, kognisi, dan psikomotor, sedangkan mutu manusia dari segi kecerdasan adalah kecerdasan nalar atau daya pikir (IQ), kecerdasan emosional atau daya hati/kalbu (EI), kecerdasan adversity (AQ), kecerdasan finansial (FQ), dan kecerdasan emosional-

spiritual (ESQ) (Soesarsono dan Sarma 2002). Menurut filsafat Platonik yang dikembangkan oleh Socrates dan diteruskan oleh muridnya, Plato, manusia terbagi menjadi tiga bagian : kepala, dada dan perut (simbol dari akal, ambisi dan nafsu) yang harus diseimbangkan menjadi harmoni sehingga terbentuklah manusia yang sempurna (Megawangi, 1999). Voydanoff (Bowen dan Pittman 1995) dan Puspitawati (2006a) menyebutkan bahwa yang dinamakan *outcome* suatu manusia adalah terdiri atas kesehatan fisik, kesejahteraan psikologi psiko-sosial terdiri atas keadaan psikologi (penghargaan diri/emosi / stres, dan kecerdasan emosi), masalah perilaku (agresifitas dan perilaku penyimpangan/ kenakalan), aspirasi dan prestasinya.

Kualitas SDM perempuan berarti secara fisik, mental, psikologis dan talenta adalah dalam kondisi yang sangat baik. Apabila prestasi pendidikan perempuan dalam kualitas yang baik, maka produktivitas perempuan di dalam bidang ekonomi dapat ditingkatkan sehingga perempuan mampu memberdayakan dirinya sendiri dan keluarganya secara lebih mandiri serta mampu menyejahterakan kehidupan secara optimal.

Kualitas perempuan sebagai ibu sangat menentukan kualitas tumbuh kembang anak-anaknya. Perempuan juga sangat dominan dalam mewujudkan Keluarga yang Berkualitas melalui fungsi pemeliharaan dan pengasuhan atau "*caring ang parenting*". Perempuan yang mempunyai prestasi pendidikan yang tinggi ditambah dengan kepribadian yang baik, maka akan berpengaruh pada kualitas pengasuhan yang baik terhadap anak-anaknya. Melalui pengasuhan yang baik, anak akan merasa lebih percaya diri, anak merasa dilindungi dan akhirnya mengakibatkan tumbuh kembang anak yang baik pula, yaitu meliputi perkembangan fisik, perkembangan sosial, perkembangan mental, dan perkembangan kognitif. Menurut teori perkembangan anak dikatakan bahwa 5 tahun pertama merupakan masa yang sangat kritis bagi anak untuk membentuk kematangan fisik dan psikologisnya. Selanjutnya, memasuki usia sekolah sampai dengan umur 12 tahun, anak mengalami proses kematangan sosial, mental, psikologis dan moral (Harris & Liebert, 1992; Santrock, 1997).

Berkaitan dengan kualitas SDM di atas, ada pembenaran tentang pandangan Gary S Becker (1975) bahwa investasi di bidang pendidikan diharuskan untuk dilaksanakan karena telah memberikan keuntungan secara makro dan jangka panjang berupa keuntungan yang tidak hanya didapat dari pemuda yang berpendidikan sebagai hasil dari investasi yang ditanamkan saja (*private rate of returns*), namun juga keuntungan yang dinikmati oleh masyarakat di lingkungan sekitar (*social rate of returns*). Pendekatan "*Rate-of-Return*" ini adalah pendekatan yang disebut *cost-benefit* yang mempunyai prinsip rasional yaitu prinsip yang mengutamakan hasil yang melebihi biaya yang dikeluarkan meskipun membutuhkan waktu menunggu sampai periode tertentu.

Berkaitan dengan prestasi pendidikan anak yang merupakan salah satu kualitas SDM, maka dalam teori keluarga disebutkan bahwa peran keluarga (*family roles*) merupakan sumber institusi paling awal dan paling kuat dalam mensosialisasikan anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan sesuai dengan nilai-nilai keluarga dan norma masyarakat yang dianut. Pengasuhan yang dilakukan oleh ayah dan ibu memberi pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung pada *outcome* anak (Simons 1996). Hasil temuan yang lebih spesifik menyatakan bahwa kontribusi peran pengasuhan yang dilakukan oleh ibu (*mother's parenting roles*) mempunyai keistimewaan yang lebih besar dibandingkan dengan peran pengasuhan yang dilakukan oleh ayah (*father's parenting roles*) (Conger dan Elder 1994; Puspitawati, 2006a). Sepertinya lingkungan keluarga yang dimotori oleh peran ibu sebagai agen utama dan pertama bagi pendidikan dan sosialisai bagi anak-anaknya akan menghasilkan prestasi akademik yang tinggi.

Meskipun ditemukan hasil adanya peran ibu yang lebih berpengaruh dibandingkan dengan peran ayah dalam meningkatkan prestasi akademik anak dan mencegah perilaku kenakalan pelajar, namun berdasarkan konsep kesetaraan dan keadilan gender (KKG) yang sudah menjadi kebijakan negara (dalam hal ini dibawah koordinasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia), maka perlu ada kesetaraan pula dalam hal pengasuhan anak di dalam keluarga. Melalui kerjasama yang baik dan erat antara ayah dan ibu dalam pengasuhan remaja, maka akan memberikan *role model* yang saling melengkapi (komplementer) bagi remaja. Ciri-ciri yang khas dalam hal pengasuhan, pendekatan individual, cara berkomunikasi dan pendekatan interpersonal antara ayah dan ibu serta remaja memberikan variasi bonding dan interaksi triadik yang saling melengkapi satu sama lain. Apabila interaksi antar anggota ini berjalan dengan baik sehingga tercapai kestabilan lingkungan keluarga, maka remaja akan berpeluang besar dalam meningkatkan prestasi akademiknya dan terhindar dari perilaku kenakalan.

Tantangan mengenai prestasi pendidikan perempuan dalam menyongsong era globalisasi adalah:

1. Meningkatkan kualitas SDM Indonesia.
Ukuran kinerja: *Human Development Index* (HDI) Indonesia
2. Meningkatkan kualitas dan peran perempuan dalam pembangunan, serta mempersempit kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam akses, kontrol, partisipasi, serta penerimaan manfaat dalam pembangunan.
Ukuran Kinerja:
 1. *Gender-related Development Index* (GDI) Indonesia
 2. *Gender Empowerment Measurement* (GEM) Indonesia

Dengan demikian, secara garis besar ada beberapa alasan penting, mengenai makna kalimat “**Mendidik Perempuan sama dengan Mendidik Bangsa**”, yaitu:

1. Ada korelasi yang positif antara meningkatnya pendidikan perempuan dengan tercapainya sasaran pembangunan kependudukan dan keluarga, yaitu terkendalinya pertumbuhan penduduk.
 - Semakin tinggi pendidikan perempuan, semakin tinggi rata-rata umur melahirkan anak pertama.
 - Semakin tinggi pendidikan perempuan, semakin rendah angka fertilitas total penduduk perempuan usia 15-49 tahun.
 - Semakin tinggi pendidikan perempuan, semakin rendah jumlah rata-rata anak yang pernah dilahirkan perempuan usia 40-49 tahun.
 - Semakin tinggi pendidikan perempuan menikah, semakin tinggi permintaan terhadap alat/obat kontrasepsi (KB).

Kesimpulan:

Dengan semakin tingginya taraf pendidikan perempuan, mereka akan cenderung menikah dalam usia yang relatif lebih dewasa. Di samping itu, mereka cenderung menggunakan alat/obat kontrasepsi untuk memperpanjang jarak kelahiran anak dan dengan sendirinya membatasi jumlah anak yang pernah dilahirkan. Mereka juga cenderung bekerja di luar rumah (pendapatan yang memadai dan exposure to media/informasi lebih luas)¹⁶.

2. Ada korelasi yang positif antara meningkatnya pendidikan perempuan dengan tercapainya sasaran pembangunan kesehatan, yaitu meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi, menurunnya angka kematian ibu, dan menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak balita.

- Sebagai dampak dari semakin tinggi rata-rata umur melahirkan anak pertama, maka relatif semakin rendah resiko kehamilan dan kematian bayi atau kematian ibu melahirkan.
- Semakin tinggi tingkat pendidikan ibu, semakin tinggi persentase anak yang diimunisasi (data internasional).
- Secara umum, semakin tinggi pendidikan (lama sekolah) penduduk, semakin tinggi umur harapan hidup (data provinsi).
- Semakin tinggi pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas (laki-laki dan perempuan), semakin rendah angka kematian bayi (data provinsi).

Kesimpulan:

Perempuan dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pengetahuan kesehatan dan gizi yang lebih baik, termasuk untuk merawat anak ¹⁶⁾.

3. Secara umum (laki-laki dan perempuan) terdapat korelasi positif dan signifikan antara tingkat ekonomi (pengeluaran per kapita) dengan tingkat kesehatan dan tingkat pengetahuan (melek aksara) serta pendidikan.

- Permasalahan penduduk dalam mengakses pelayanan kesehatan adalah faktor kemiskinan (34%).
- Semakin tinggi pengeluaran per kapita, semakin tinggi persentase penduduk yang melek aksara.
- Kesenjangan angka melek aksara antara perempuan dari kelompok pengeluaran tinggi dan pengeluaran rendah lebih besar dari pada kesenjangan yang sama pada penduduk laki-laki. Hal ini menandakan bahwa pengaruh tingkat ekonomi kepada rendahnya tingkat pengetahuan (melek aksara) lebih besar terjadi pada penduduk perempuan daripada penduduk laki-laki.
- Permasalahan utama penduduk (laki-laki dan perempuan) usia 7-18 tahun tidak melanjutkan sekolah adalah masalah kemampuan untuk membiayai.

Kesimpulan:

Semakin meningkatnya pendapatan/ekonomi penduduk (laki-laki dan perempuan), maka semakin besar kemungkinan mereka untuk mampu mengakses pelayanan kesehatan dan pendidikan ¹⁶⁾.

Keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) sangat tergantung pada faktor manusia dan sumber daya alam di sekitarnya serta hubungan antara keduanya. Secara garis besar, manusia yang berkualitas dan arif serta bijaksana akan mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengelola sumberdaya alam, agar nilai tambah dari sumberdaya alam itu akan memungkinkan peningkatan penyediaan pangan bagi konsumsi manusia dan akhirnya dapat mewujudkan kualitas hidup yang berkelanjutan. Untuk itu prestasi baik laki-laki dan perempuan sebagai warga negara sangat dibutuhkan dalam menjalankan pembangunan yang berkelanjutan tersebut. Dengan demikian, dari segi kebijakan makro disarankan agar kinerja pembangunan dapat bersifat responsif gender.

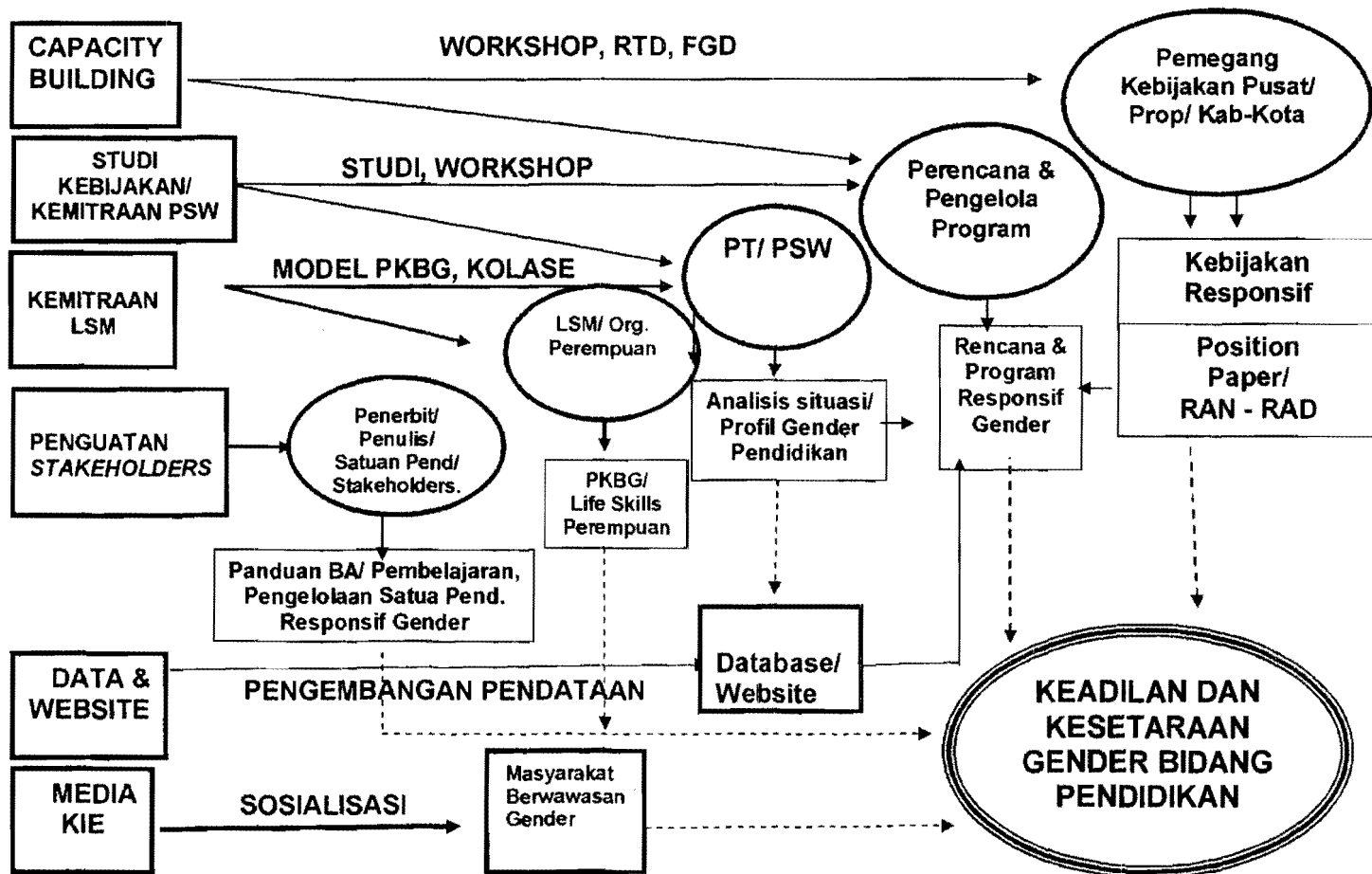
PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) BIDANG PENDIDIKAN

Bentuk pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan tercantum pada strategi kebijakan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas, 2004, Gambar 3) sebagai berikut:

1. Kegiatan *Capacity Building*

- a. Tujuan kegiatan *Capacity Building* adalah:
 - Menata ulang kelembagaan, aturan dan mekanisme serta kebijakan agar kondusif terhadap pembangunan pendidikan responsif gender.
 - Mendorong dikeluarkannya kebijakan dan program pembangunan pendidikan berwawasan gender di masing-masing propinsi dan kabupaten/ kota.
 - Meningkatkan komitmen dan kualitas sumberdaya manusia sehingga memiliki:
 - Pemahaman dan sensitivitas gender di lingkungan pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan pendidikan yang responsif gender.
 - Pemahaman dan sensitivitas gender para *stakeholders* pendidikan.
 - Pemahaman, sensitivitas gender dan kemampuan para perencana program untuk melaksanakan analisis situasi dan memahami isu-isu gender di bidang pendidikan sebagai dasar penyusunan perencanaan pendidikan responsif gender.
 - Komitmen pemerintah daerah yang terwujud dalam bentuk *Position Paper* dan Rencana Aksi Daerah untuk melaksanakan pembangunan pendidikan yang responsif gender.
- b. Tahapan kegiatan *capacity building* mencakup:
 - Pengembangan koordinasi antar dinas terkait di daerah dengan tim pusat untuk mendorong tersusunnya kebijakan dan program pembangunan pendidikan berwawasan gender.
 - Advokasi, audiensi dan diskusi (*round table discussion*) agar tersedia aturan, kelembagaan dan mekanisme yang mendukung pelaksanaan Pengarusutamaan Gender bidang pendidikan.
 - Pembentukan Pokja Pengarusutamaan Gender bidang pendidikan di propinsi dan kabupaten kota yang sekurang-kurangnya terdiri dari unsur pakar gender dan wakil-wakil lembaga pemerintah daerah (Dinas pendidikan, BPS, Bapeda, Lembaga yang menangani Pemberdayaan Perempuan, Perguruan Tinggi (Pusat Studi Wanita/ Pusat Studi Gender) dan LSM).
 - Pengembangan *tool kits* (bahan ajar) *capacity building* dengan memperhitungkan hasil analisis gender tentang situasi pendidikan provinsi dan atau kabupaten/kota.
 - Penentuan kriteria dan identifikasi sasaran *Capacity Building*, baik lembaga, aturan, kebijakan maupun SDM.
 - Penjadwalan kegiatan sesuai dengan tata urutan prioritas kegiatan, mulai dari pengembangan koordinasi antar dinas terkait, advokasi, audiensi, dan diskusi (*round table discussion*) antara tim pusat dengan daerah, Sosialisasi Pengarusutamaan Gender bidang pendidikan, Pelatihan Pengarusutamaan Gender bidang pendidikan untuk *Stakeholders*, Pelatihan Penyusunan Kebijakan Pendidikan Responsif Gender antara lain dengan menggunakan metode *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Policy Outlook Plan of Action* (POP), Diskusi (*Round Table Discussion*) Pengarusutamaan Gender Bidang pendidikan.

**KERANGKA KERJA
PENGARUSUTAMAN GENDER BIDANG PENDIDIKAN**

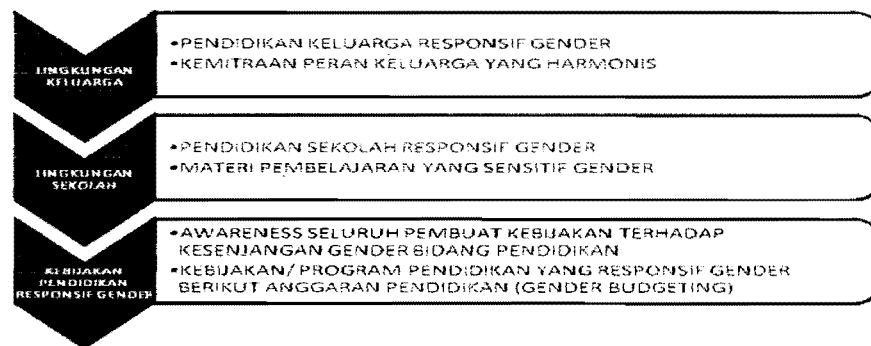


Gambar 3. Strategi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan di Departemen Pendidikan Nasional-RI. (Sumber: Depdiknas, 2004b).

- Pelaksanaan kegiatan.
 - Evaluasi kegiatan.
2. Meningkatkan strategi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang responsive gender melalui analisis gender terhadap bahan ajar yang diberikan pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan, kemudian memberikan masukan kepada para penulis dan penerbit untuk menyusun bahan ajar dan materi pembelajaran yang tidak bias gender.
 3. Meningkatkan kemitraan antara Departemen Pendidikan Nasional dengan berbagai pihak (*stakeholders*), diantaranya pihak perguruan tinggi, LSM dan pemangku kepentingan lainnya untuk bekerjasama dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender bidang pendidikan. Salah satu kegiatan yang sudah dilakukan adalah Program Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG), Program Pendidikan Perempuan Marjinal, dan Program Kolase Perempuan.

GENDER CHECKLIST DALAM PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) BIDANG PENDIDIKAN

Bab ini merupakan masukan bagi strategi PUG Bidang Pendidikan agar tingkat kesenjangan gender dapat diminimalkan dan agar prestasi pendidikan perempuan Indonesia dalam menyongsong era globalisasi. Ada beberapa *checklist* yang harus diperhatikan baik oleh pihak keluarga dan masyarakat, maupun oleh pihak pemerintah.



Gambar 4. Checklist Kesetaraan dan Keadilan Gender Bidang Pendidikan dari Mulai Lingkungan Keluarga, Sekolah dan Kebijakan Pemerintah.

Checklist Kesetaraan Gender Di Tingkat Keluarga dan Masyarakat ¹⁵⁾

1. Anak laki-laki dan perempuan adalah berbeda, namun jangan dibeda-bedakan (sesuai dengan Motto dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan-Republik Indonesia).
2. Nilai ekonomi anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan.

3. Mendidik anak baik laki-laki maupun perempuan harus berdasarkan asas keadilan gender dalam rangka memperoleh akses, manfaat, partisipasi, kontrol terhadap semua sumberdaya keluarga untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat jasmani dan rohani.
4. Setiap anggota keluarga terbuka untuk berkomunikasi, dapat mendengarkan keluhan anggota keluarga, memecahkan masalah keluarga secara bersama, komunikasi terbuka dan jelas, saling berbagi dan empati, saling percaya dan menghargai.
5. Meluangkan waktu bersama; memiliki waktu luang bersama dan melakukan aktivitas bersama dengan seluruh anggota keluarga, dan mempunyai ikatan kuat antar anggota keluarga.
6. Pembagian peran yang jelas dan adil antar anggota keluarga; siapa yang bertanggung jawab melaksanakan peran instrumental (penyediaan sumberdaya dan kebutuhan anggota keluarga) dan peran afektif (pengasuhan, dukungan), serta komitmen/tanggung jawab yang baik terhadap peran tersebut.
7. Menjunjung tinggi prinsip harmonis dalam keluarga; menghindari konflik atau pertengkaran suami-istri terutama didepan anak-anak; saling menahan diri untuk tidak membentak/memaki saat terjadi konflik.
8. Anak perempuan boleh memilih bidang eksakta sejak sekolah menengah sampai ke Perguruan Tinggi (contohnya SMK-TI, SMK-Informatika, Fakultas Teknik, Fakultas MIPA, Fakultas Kedokteran, dll).
9. Anak perempuan boleh sekolah jauh dari rumahnya tanpa mengkuatirkan "keselamatannya sebagai perempuan".
10. Harus ada perubahan pandangan bahwa "Anak perempuan yang sekolah tinggi masih tetap 'laku' untuk mendapatkan suami".
11. Anak perempuan yang telah lulus kuliah dan masih punya potensi besar disarankan untuk melanjutkan kuliah ke pasca sarjana walaupun telah berkeluarga.
12. Anak perempuan yang telah lulus kuliah dan sudah berkeluarga disarankan untuk tetap berkarya (menjadi *home-based worker*), dan tidak melupakan hasil jerih payah kuliahnya.
13. Pengasuhan anak perempuan berperspektif gender:
 - a. Ayah & Ibu harus memperhatikan personalitas anak yang masing-masing unik (introvert /feminin vs extrovert/maskulin).
 - b. Cari pendekatan yg tepat pada anak perempuan, awas *moodnya*.
 - c. Pendekatan ayah dan ibu harus bijaksana dan hangat serta penuh pengertian.
 - d. Beri sosialisasi tentang sifat laki-laki dan cara respek dan menghargai laki-laki.
 - e. Ayah mensosialisasikan apa yang diharapkan laki-laki terhadap perempuan.
 - f. Ibu mensosialisasi bagaimana seorang perempuan memberi arahan dan nasehat pada laki-laki.
 - g. Orangtua memberi contoh bagaimana kemitraan laki-laki dan perempuan di dalam keluarga dan masyarakat.
 - h. Tumbuhkan motivasi belajar, memilih program studi yang cocok dengan kompetensi dan minatnya.
 - i. Tidak ada salahnya memberi kesempatan anak perempuan yang cakap untuk sekolah di luar kota dan ke perguruan tinggi dengan program studi teknik dan ilmu eksakta.
 - j. Beri cara kemandirian yang cocok untuk perempuan.
 - k. Anak perempuan harus bisa memahami listrik, kompor gas, kendaraan, dan *sense of dangerous* untuk keperluan "*survival strategies*".
14. Pengasuhan anak laki-laki berperspektif gender:
 - b. Ayah & Ibu harus memperhatikan personalitas anak yang masing-masing unik (introvert /feminin vs extrovert/maskulin)

- c. Cari pendekatan yg tepat pada anak laki-laki, awas *selebornya*.
- d. Pendekatan ayah dan ibu harus bijaksana dan hangat serta penuh pengertian.
- e. Beri sosialisasi tentang sifat perempuan dan cara respek dan menghargai perempuan.
- f. Ibu mensosialisasikan apa yang diharapkan perempuan terhadap laki-laki.
- g. Ayah mensosialisasi bagaimana seorang laki-laki memberi perlindungan dan nasihat pada perempuan.
- h. Orangtua memberi contoh bagaimana kemitraan laki-laki dan perempuan di dalam keluarga dan masyarakat.
- i. Tumbuhkan motivasi belajar, memilih program studi yang cocok dengan kompetensi dan minatnya.
- j. Tidak ada salahnya memberi kesempatan anak laki-laki untuk sekolah dengan program studi ilmu sosial, keluarga, dan kerumahtanggaan.
- k. Beri cara kemandirian yang cocok untuk laki-laki.
- l. Anak laki-laki harus bisa memasak, mencuci, menyeterika, dan membersihkan tempat tidur sendiri untuk keperluan "*survival strategies*".

Checklist Kebijakan Kesetaraan Gender di Bidang Pendidikan ^{6, 7, 25)}

1. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Berwawasan Gender
2. Peningkatan Penyebarluasan Pendidikan Berwawasan Gender ⁷⁾
3. Peningkatan Kekuatan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan di Bidang Pendidikan

Hal-Hal yang Layak Dipikirkan oleh Kita Semua....

1. Perguruan Tinggi secara khusus memberikan pelatihan mengenai dasar-dasar wawasan peka gender kepada berbagai pihak, dimulai dari internal universitas (pihak rektorat, staf pengajar, dan para mahasiswa) melalui berbagai kegiatan baik pelatihan, ceramah, *talk show* atau bahkan mengintegrasikan isu gender ke dalam beberapa mata kuliah umum di tingkat persiapan bersama.
2. Mengembangkan strategi peningkatan prestasi perempuan melalui pemberian beasiswa khusus bagi perempuan berprestasi atau pemberian dana penelitian khusus bagi siapapun yang tertarik untuk meneliti topik-topik yang berkaitan dengan perempuan.
3. Dalam rangka meningkatkan kualitas perempuan di era globalisasi, maka penting untuk dipikirkan pendidikan di dalam keluarga berwawasan gender agar generasi mendatang lebih sadar dan responsif gender dibandingkan dengan generasi sekarang. Pendidikan Keluarga yang Berwawasan gender ini dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata/ Kuliah Kerja Profesi mahasiswa dengan sistim pendampingan masyarakat dan melibatkan semua unsur kelembagaan di masyarakat diantaranya PKK dan Posyandu, Perkumpulan sosial-budaya, dll.
4. Mengingat kesenjangan gender bidang pendidikan berada pada pihak perempuan yang kondisinya masih tertinggal dibandingkan dengan pihak laki-laki, maka dalam rangka mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dibutuhkan suatu strategi atau upaya untuk memberikan dukungan dan bantuan yang lebih pada perempuan dalam akses, partisipasi, dan kontrol serta manfaat yang lebih dibandingkan dengan laki-laki.

Strategi untuk meningkatkan prestasi perempuan di bidang pendidikan dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, misalnya:

a. ***Women help Women*** mulai dari tingkat keluarga dan tingkat masyarakat.

Artinya bahwa:

- Kelembagaan dan organisasi perempuan harus meningkatkan kinerjanya untuk membantu sesama perempuan marjinal lainnya untuk meningkatkan SDMnya agar dapat mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (KKG) dalam berbagai bidang pembangunan.
- Pada tahapan individual, perempuan harus diberikan kesadaran tentang adanya perasaan empati, solidaritas, dan pentingnya perjuangan perempuan secara bersama-sama dalam memajukan seluruh perempuan Indonesia dalam berbagai bidang menuju kesejajaran dan kemitraan dengan laki-laki.

b. ***Men help Women*** mulai dari tingkat keluarga dan tingkat masyarakat.

Artinya bahwa:

- Laki-laki dengan kesadarannya mempunyai kemampuan untuk berempati, bekerjasama, dan toleran terhadap kaum perempuan. Dengan adanya kemitraan di segala bidang pembangunan yang dilandasi atas rasa membutuhkan dan saling melengkapi (baik secara profesional maupun psikologis) menjadikan kaum laki-laki untuk lebih dapat membuka diri dan bersedia untuk membagi wilayah “*Public Spheranya*” kepada kaum perempuan.
- Laki-laki bersedia untuk menolong kaum perempuan dalam meningkatkan kualitas SDMnya.

c. ***Families help Women.***

Artinya bahwa:

- Seluruh keluarga Indonesia meningkatkan peran dan fungsinya untuk mendidik dan melindungi anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, dengan memperhatikan kebutuhan khusus sesuai dengan faktor biologisnya, namun memberikan kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan formalnya.

d. ***Government and Community Institutions help Women.***

Artinya bahwa:

- Semua rencana strategi pemerintah dilandasi oleh adanya wawasan gender, sehingga kebijakan yang dilaksanakan sudah responsif gender.
- Perlu ada gerakan nasional dalam peningkatan kemitraan laki-laki dan perempuan mulai dari tingkat keluarga dan masyarakat dalam rangka meningkatkan HDI.
- Perlu ada kampanye nasional mengenai “Peningkatan HDI Indonesia dalam Menyongsong Globalisasi Melalui Kemitraan Gender”, dengan pendekatan:
 - o Penyuluhan dan pendampingan masyarakat.
 - o KIE yang tepat dan efektif.

PENUTUP

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SisDikNas) disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk itu hal yang paling prioritas (*crucial*) harus dilakukan adalah kesepakatan dan komitmen bersama antar stakeholders (pihak legislatif & yudikatif, pihak eksekutif, para pendidik/ dosen, para pelajar/ mahasiswa, pihak keluarga, kelompok masyarakat) dalam mengatasi akar permasalahan kesenjangan gender di bidang pendidikan.

Dalam satu dekade terakhir, prestasi perempuan memang sudah mengalami kemajuan dalam dekade terakhir ini, bahkan dalam skala mikro pada tingkatan jenjang sekolah dasar dan menengah, bahkan terkadang mengungguli prestasi laki-laki. Namun demikian secara makro dan jangka panjang, masih memerlukan perhatian khusus mengingat masih adanya kesenjangan gender untuk jenis, jenjang dan jalur pendidikan tertentu. Oleh karena itu harus ada perubahan cara pandang (*mind set*) terhadap persepsi tentang konsep gender pada semua komponen bangsa dan menyepakati adanya strategi PUG yang tepat dan efektif. Hal ini dimaksudkan agar generasi muda yang akan datang baik laki-laki maupun perempuan dapat mengisi era globalisasi dengan kualitas SDM dan daya saing yang lebih baik.

Sebagai penutup dari bab ini adalah perlunya penerapan kebijakan pembangunan di bidang pendidikan yang responsif gender dengan memfokuskan lebih besar kepada kondisi perempuan agar dapat meningkatkan prestasinya, khususnya di bidang pendidikan. Jadi peran dan fungsi institusi-institusi pemerintah harus dioptimalkan agar pembangunan dapat terwujud dengan maksimal bagi kesejahteraan Bangsa Indonesia baik laki-laki maupun perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Becker, G.S. 1975. A Theory of Marriage. Dalam T.W. Schultz (Ed.), *Economics of the Family : Marriage, Children, and Human Capital* (hal. 299-344). The University of Chicago Press, Chicago.
2. Bowen GL, Pitman JF, 1995. *The Work and Family Interface: Toward a Contextual Effects Perspective*. Minnesota: National Council on Family Relations.
3. BPS-BAPPENAS-UNDP. 2004. *Indonesia Laporan pembangunan Manusia 2004: Ekonomi dan Demokrasi*.
4. Conger RD, Elder GH. 1994. *Families in Troubled Times: Adapting to Change in Rural America*. New York: Aldine De Gruyter.
5. Departemen Dalam Negeri. 2003. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Di Daerah.
6. Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). 2004a. *Pesan Standar: Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan*.
7. Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). 2004b. *Pembangunan Kapasitas Kelembagaan: Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan*.
8. Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP). 2005. *Panduan dan Bunga Rampai: Panduan Pembelajaran Pengarusutamaan Gender*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI-BKKBN-UNFPA.
9. Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). 2006. *Materi Rujukan Kesenjangan Gender Bidang Pendidikan*.
10. Megawangi R. 1999. *Membiarkan Berbeda ? : Sudut pandang Baru tentang Relasi Gender*. Mizan Pustaka. Bandung.
11. Harris JC & Liebert RM. 1992. *The Child. A Contemporary View of Development*. Prentice-Hall. USA.
12. Moser, C and Levy, C. 1993. *Training Materials Developed for Training in Gender Planning for Development*. In Caroline O.N. Moser *Gender and Development: Gender Planning and Development: Theory, Practice and Training*. Routledge. London.
13. Overholt, Cloud and Austin. 1985. *Gender Roles in Development Projects*. Kumarian Press, Connecticut.
14. Puspitawati, H. 2006a. *Pengaruh Faktor keluarga, Lingkungan Teman dan Sekolah Terhadap kenakalan Pelajar di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di Kota Bogor*. Disertasi Doktor yang tidak Dipublikasikan. Sekolah Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor.
15. Puspitawati. 2006b. *Pengasuhan Berwawasan Gender*. Presentase Tim pakar Gender Departemen Pendidikan Nasional-RI.
16. Rosalin, LN. 2007. *PERENCANAAN PEMBANGUNAN DIKDASMEN YANG RESPONSIF GENDER*. BAPPENAS. Disampaikan pada Workshop Pengarusutamaan Gender, Diselenggarakan oleh Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional, Hotel Safari Garden, Bogor, 23 Mei 2007.
17. Simon RI. 1996. *Understanding Differences Between Divorced and Intact Families*. Sage Publications.
18. Soesarsono, & Ma'mun S. 2002. *Sekilas Kewirausahaan Tantangan Mandiri, Bogor: Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan IPB*.
19. Santrock JW. 1997. *Children*. Brown Benchmark Publisher. USA.
20. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
21. UNDP. 2004. *Human development Report*.
22. UNESCO. 2005. *Education For All: The Quality Imperative*. EFA: Global Monitoring Report.
23. Mugniesyah, S., Sriwahyuni, E., Mahfuds, & Puspitawati, H. 2003. *Profil Gender di Perguruan Tinggi Jawa Barat*. Laporan Kerjasama: Pusat Studi Wanita-LPPM-IPB dan Departemen Pendidikan Nasional-RI.
24. Kementerian Pemberdayaan Perempuan. 2000. *Panduan Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional*.
25. Kementerian Pemberdayaan Perempuan. 2003. *Gender Checklist dalam Pembangunan*. Presentase.

CURRICULUM VITAE PENYAJI

Nama	: Dr. Ir. Herien Puspitawati, M.Sc., M.Sc.
Pendidikan	: S1 Agribisnis, Fak Pertanian, IPB S2 <i>Family & Consumer Sciences, Iowa State Univ., USA</i> S2 <i>Family Sociology, Iowa State Univ., USA</i> S3 Gizi Masyarakat & Sumberdaya Keluarga, IPB
Pekerjaan	: <ul style="list-style-type: none">▪ Dosen S1 di Dept. IKK-FEMA IPB▪ Dosen S2 dan S3 di Dept. IKK-FEMA IPB▪ Peneliti Pada PSW-PSP3 LPPM-IPB
Jabatan Lain	: Anggota Tim Pakar Gender Nasional - Kelompok Kerja Gender-Depdiknas Pusat
Alamat	: Dept. IKK-FEMA-IPB Jl. Puspa- Kampus IPB Darmaga Telpkantor: (0251) 8621258/ 8628303; Fax: (0251) 8622276 HP 08 1111 0920; R: (0251) 8639524 E-mail: herien_puspitawati@email.com